

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Siti Suwaibatul Aslamiyah¹

Abstract: *Education as an important factor in the process of development and progress of human life, a very dominant center of attention from all walks of society, especially those who have the authority to develop, so that a variety of methods are used to develop it. However, that did not run smoothly and seamlessly as there are a variety of obstacles and problems that become an obstacle smooth the business, especially at a time like now, in the midst of the complexity of the problems of the nation and the state. Therefore, in the article entitled "Problems of Islamic Education in Indonesia," the authors sought review of the problems faced and their Islamic education in Indonesia it appears logical alternative solutions to these problems. As a conclusion of this paper is that the problem-permasalahan being faced by today's Islamic education is a range of quality and quality of Islamic education are less in sync with the needs of the community and are less responsive to the demands of the workplace. With such circumstances, attempts to do is to Islamic education system should be reformed, direaktualisasi, and innovated in order to resolve themselves with mesyarakat dynamics and can meet the demands and needs of society and the free market era of regional autonomy*

Keywords: *Problems, Islamic Education*

Pendahuluan

Sebuah masa memiliki tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, tantangan di suatu masa memang merupakan kelanjutan dari masa sebelumnya. Namun, dalam sejumlah kasus lainnya, tantangan dimaksud muncul dalam bentuk yang khas dan berbeda dari masa-masa sebelumnya. Kekhasan ini sangat mungkin muncul menyusul perubahan atau pergeseran yang terjadi. Artinya perubahan menjadi kata kunci dan prinsip yang mengiringi setiap masa. Penyikapan terhadap prinsip perubahan akan menentukan tingkat keberhasilan.

Prinsip di atas berlaku untuk semua aspek kehidupan. Sebagaimana layaknya pendidikan pada umumnya, pendidikan Islam juga patut merespon setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Penyikapan seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan Islam untuk kepentingan keberlangsungan dan sekaligus kemajuan pengelolannya. Dalam konteks ini, beragam permasalahan muncul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan Islam, termasuk dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Karena itu, pemahaman yang baik terhadap problematika pendidikan Islam harus dimiliki oleh setiap upaya pengembangan pendidikan keagamaan ini.

Salah satu kekuatan penting dari pendidikan Islam, khususnya untuk konteks Indonesia, adalah moral. Lembaga pendidikan Islam menjadi institusi yang memiliki kepercayaan moral sangat besar yang diberikan oleh masyarakat. Dengan kekuatan moral ini, lembaga pendidikan Islam tidak saja dianggap menjadi medium pengembangan wawasan atau pengetahuan keislaman di Indonesia, akan tetapi juga katup pengaman moral atas perkembangan dan atau perubahan zaman yang bila tidak diantisipasi berpotensi memunculkan dampak negatif bagi masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah pentingnya lembaga pendidikan Islam dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul di era globalisasi.

Pendidikan sebagai salah satu faktor penting dalam proses pengembangan hidup manusia dan kemajuannya, menjadi pusat perhatian yang sangat dominan dari semua kalangan masyarakat, terutama mereka yang memiliki kewenangan khusus untuk

¹ Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan

mengembangkannya, sehingga beragam cara dilakukan untuk mengembangkannya agar cita-cita perkembangan bangsa dan negara terus lebih baik. Akan tetapi, beragam usaha yang dilakukan demi untuk mengembangkan pendidikan itu tidak berjalan dengan begitu lancar dan mulus karena ada beragam hambatan dan problema yang menjadi kendala kelancaran usaha tersebut, lebih-lebih pada saat seperti sekarang, ditengah-tengah kompleksitas problema bangsa dan negara sehingga semua komponen yang bertanggung jawab dalam hal tersebut menjadi bingung untuk menformulasikan pendidikan ini menjadi satu-satunya solusi yang bisa membebaskan bangsa dan negara dari keterpurukan dalam berbagai aspek.

Kompleksitas problem bangsa tersebut menuntut formulasi pendidikan menjadi satu satunya solusi alternatif untuk membebaskan bangsa dan negara dari keterpurukan tersebut, sehingga design pendidikan yang selama ini diselenggarakan juga mengalami problem karena tuntutan masyarakat yang semakin kompleks kemudian ditambah dengan krisis multi dimensi.

Oleh karena itu, di dalam tulisan yang sangat sederhana ini penulis berusaha mereview problem-problem yang dihadapi pendidikan khususnya pendidikan Islam di Indonesia sekarang ini dengan judul "problematika pendidikan Islam di Indonesia" beserta alternatif solusi atas permasalahan tersebut.

Definisi Problematika Pendidikan Islam

Problematika secara etimologi berasal dari kata "problem" yang berarti "persoalan atau permasalahan".² Maka problematika berarti hal-hal yang menimbulkan permasalahan yang belum bisa terpecahkan.³ Dalam kamus ilmiah populer, problema memiliki arti soal, masalah, perkara sulit dan persoalan.⁴

Menurut Prof. Sugarda Purbakawaca, dalam "Ensiklopedi Pendidikan"nya, memberikan pengertian pendidikan, sebagai berikut: "Pendidikan dalam arti luas meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya serta ketrampilannya (orang menamakan ini juga "mengalihkan" kebudayaan, dalam bahasa Belanda: Cultuurover dracht) kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani maupun rohani."

Sedangkan pendidikan Islam, ada beberapa pengertian secara terminologi yang diformulasikan oleh para ahli Pendidikan Islam, diantaranya adalah:

- a. Menurut al-Syaibaniy mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktifitas asasi dan profesi diantara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.
- b. Menurut Muhammad Fadhil al-Jamaly, mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut, diharapkan bisa membentuk pribadi peserta didik yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan, maupun perbuatannya.
- c. Ahmad Tafsir mendefinisikan Pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang, agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

Dari batasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang (peserta didik) dapat mengarahkan kehidupannya sesuai

² WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka: 1993), 38

³ Ibid, 701

⁴ Pius. A. Partanto & M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), 626

dengan ideologi Islam. Melalui pendekatan ini, ia akan dapat dengan mudah membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya.

Konsep dasar pendidikan Islam yakni usaha, kemanusiaan, perkembangan, proses, bimbingan oleh manusia secara sadar.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa problematika pendidikan Islam adalah persoalan atau permasalahan yang dihadapi pendidikan Islam.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia

Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan yang multi kompleks, mulai dari konseptual-teoritis sampai dengan operasional-praktis. Hal ini dapat dilihat dari ketertinggalan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pendidikan Islam terkesan sebagai pendidikan “kelas dua”. Sesungguhnya sangat ironis, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim namun dalam hal pendidikan selalu tertinggal dengan ummat yang lainnya.

Berkaitan dengan ini, ada beberapa fenomena yang dicatat Azyumardi Azra sehingga menyebabkan pendidikan Islam selalu dalam posisi tersingkirkan. *Pertama*, pendidikan Islam sering terlambat merumuskan diri untuk merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat, sekarang dan masa datang. *Kedua*, sistem pendidikan Islam kebanyakan masih lebih cenderung mengorientasikan diri pada bidang-bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial ketimbang ilmu-ilmu eksakta semacam fisika, kimia, biologi dan matematika modern. Padahal ilmu ini mutlak diperlukan dalam mengembangkan teknologi canggih. Disamping itu ilmu-ilmu eksakta ini belum mendapat apresiasi dan tempat yang sepatutnya dalam sistem pendidikan Islam. *Ketiga*, usaha pembaharuan dan peningkatan sistem pendidikan Islam sering bersifat sepotong-potong atau tidak komprehensif dan menyeluruh, yang hanya dilakukan sekenanya atau seingatnya, sehingga tidak terjadi perubahan secara esensial di dalamnya. *Keempat*, sistem pendidikan Islam tetap lebih cenderung berorientasi ke masa silam ketimbang berorientasi ke masa depan, atau kurang bersifat *future-oriented*. *Kelima*, sebagian besar sistem pendidikan Islam belum dikelola secara profesional baik dalam perencanaan, penyiapan tenaga pengajar, kurikulum maupun pelaksanaan pendidikannya, sehingga kalah bersaing dengan lainnya.⁵

Sedangkan Abdurrahman Mas’ud menyoroti kelemahan pendidikan Islam secara umum adalah: (1) Dunia pendidikan Islam kini terjangkit penyakit *simtomdikotomik*, dan *spirit of inquiry*, (2) Kurang berkembangnya konsep *humanisme religius* dalam dunia pendidikan Islam, yakni adanya tendensi pendidikan Islam yang lebih berorientasi pada konsep “abdullah” daripada “khalifatullah” dan “hablun minallah” daripada “hablun minannas”, (3) Adanya orientasi pendidikan yang timpang, sehingga melahirkan masalah-masalah besar dalam dunia pendidikan Islam, dari persoalan filosofis sampai ke metadologis, bahkan sampai ke *the tradition of learning*.⁶

Sementara Muhaimin menyoroti, bahwa kelemahan pendidikan Islam di Indonesia adalah karena masih adanya konsepsi dan praktek pendidikan Islam yang tercermin pada kelembagaannya maupun isi programnya pada konsep atau pengertian yang sempit, yaitu hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrowi yang terpisah dengan kehidupan dunia, hanya mengurus persoalan ritual dan spiritual, sementara kehidupan ekonomi, politik, seni budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap sebagai urusan duniawi yang menjadi bidang garap pendidikan umum.⁷

⁵ Usman Abu bakar & Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam (Respon Kreatif Terhadap Undang-undang Sisdiknas)* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005), 80-81

⁶ Ibid, 81

⁷ Ibid, 82

Dari berbagai pendapat di atas, dapat digarisbawahi bahwa kelemahan atau hambatan yang dihadapi dunia pendidikan Islam tersebut adalah terletak pada kelemahan intelektualitas muslim dalam menterjemahkan pendidikan Islam secara sempit, doktrinal, dan dikotomis, yakni orientasinya lebih pada aspek kehidupan ukhrawi, sementara aspek kehidupan duniawi dipisahkan.

Sedangkan hambatan atau kelemahan pendidikan Islam sebagai proses pembelajaran menurut Amin Abdullah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) Pendidikan agama (Islam) lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif semata serta amalan-amalan ibadah praktis, (2) Pendidikan agama (Islam) kurang concern terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi "makna" dan "nilai" yang perlu diinternalisasikan dalam diri siswa lewat berbagai cara, media dan forum, (3) Masih berjalannya penggunaan metodologi pendidikan agama yang konvensional-tradisional, (4) Pendidikan agama (Islam) lebih menitikberatkan pada aspek korespondensi-tekstual, yang lebih menekankan hafalan teks-teks keagamaan yang sudah ada, (5) Sistem evaluasi, bentuk-bentuk soal ujian agama Islam menunjukkan prioritas utama pada kognitif dan jarang pertanyaan tersebut mempunyai bobot muatan 'nilai' dan 'makna' spiritual keagamaan yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari.

Marwan Sarijo, menjelaskan dengan rinci kelemahan-kelemahan pendidikan Islam, antara lain: 1) Adanya alokasi waktu yang kurang memadai, 2) Isi kurikulum yang terlalu sarat, 3) Adanya sarana dan lingkungan sekolah tidak menunjang pelaksanaan pendidikan Islam, 4) Kurang adanya kerjasama yang baik antar komponen guru, 5) Keterbatasan kemampuan menguasai materi yang diajarkan, 6) Kurang adanya kemampuan yang komprehensif untuk menjawab permasalahan perkembangan zaman, 7) Kurang mampu atau tidak sungguh-sungguh untuk mengembangkan metodologi yang tepat, dan 8) Kurang memperhatikan didaktik-metodik dan psikologi anak.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, permasalahan yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia dapat dipetakan menjadi empat macam, yaitu:

- a. Persoalan penduduk
- b. Persoalan wawasan
- c. Persoalan dana, dan
- d. Persoalan membangun pendidikan Islam secara terpadu⁸

Tidak dapat dipungkiri memang, pendidikan Islam dari segi kuantitas menunjukkan perkembangan yang dinamis mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Namun dari segi kualitas masih dipertanyakan. Harus diakui berdasarkan fenomena yang ada, output lembaga pendidikan Islam dalam menempuh lapangan kerja dalam negeri saja masih jauh dari harapan masyarakat apalagi bila dikaitkan dengan persaingan global dalam era pasar bebas output lembaga pendidikan Islam kalah bersaing dengan output lembaga pendidikan luar negeri. Hal tersebut disebabkan karena lembaga pendidikan Islam menghadapi berbagai persoalan antara lain:

1. Persoalan yang berkaitan dengan normatif-filosofis. Pendidikan Islam belum bisa menuntaskan model lembaga pendidikan yang adaptik terhadap perkembangan zaman, apakah model pesantren yang lebih menampilkan watak tradisionalnya yang mengidealisasikan masa lalu, atau model madrasah yang menampilkan kemoderenan yang lebih pragmatis dan progresif, atau model pesantren moderen yang lebih mengacu ke masa depan dengan tetap mempertahankan ruh keislaman seperti yang terdapat dalam pesantren. Selain itu pendidikan Islam masih belum dapat menemukan konsep ilmu-ilmu keislaman, apakah dengan enggalinya dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan Hadits, atau dengan adopsi ilmu-ilmu sekuler yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits, atau dengan mengambil konsep-konsep ilmu sekuler dan mencarikan ayat al-

⁸ Ibid, 87

Qur'an dan Hadits untuk mengintimidasinya, atau dalam bentuk asimilasi yaitu dengan mengambil konsep ilmu sekuler dan menyesuaikannya disana sini. Walaupun sudah ada pemikiran ke arah Islamisasi ilmu pengetahuan, pengintegrasian IMTAK dan IPTEK namun dalam prakteknya masih menjurus kepada dualisme - dikotomi antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum dalam kurikulum lembaga pendidikan Islam.

2. Menyangkut persoalan interen dan klasik yang berkaitan dengan masalah pendidikan antara lain: (1) kualitas guru yang belum memadai, (2). terbatasnya sumber daya manusia dan dana, (3). produktifitas lembaga yang kurang bermutu, (4) efisiensi pendidikan yang rendah, (5) relevansi pendidikan dengan dunia kerja, (6) manajemen pendidikan yang seragam, (7) proses pembelajaran yang kaku, (8) sarana prasarana yang belum lengkap, (9) perpustakaan yang belum memadai, dan (10) kualitas in-put dan out-put yang rendah.

Semua persoalan di atas masih ditemukan pada sebagian besar lembaga pendidikan Islam sehingga dapat dikatakan sulit mencari lembaga pendidikan Islam yang berkualitas.⁹

Dalam buku ilmu pendidikan Islam karangan Akh. Muzzaki dan Kholilah dijelaskan bahwa ada beberapa permasalahan yang sedang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia yang dapat dipetakan menjadi tiga yaitu: (1) Benturan antara idealisme dan pragmatisme, (2) Tantangan inovasi kurikulum dan khususnya pembelajaran, dan (3) Tantangan desentralisasi dan otonomi pendidikan.

Benturan antara idealisme dan pragmatisme. Menghadapi derasnya arus globalisasi, minimal ada dua tantangan besar yang dihadapi oleh pendidikan Islam yakni aspek kelembagaan dan penguatan materi pendidikan. Untuk tantangan pertama, bila mengamati kekuatan pasar kita diingatkan oleh dua kategori pendidikan yang kini menyeruak ke permukaan; pendidikan yang dikendalikan oleh pasar dan pendidikan yang berorientasi penciptaan pasar. Untuk kategori pertama pendidikan diombang ambingkan oleh selera pasar (masyarakat) menyusul pergerakannya yang didikte oleh kepentingan pasar itu sendiri. Dalam konteks ini kualitas layanan pendidikan semestinya dengan tuntutan konsumen masyarakat. Memang dari sisi kepentingan material, pendidikan dalam kategori ini lebih menguntungkan dibanding yang lain karena ia mengikuti selera pasar. Akan tetapi, pendidikan bisa kehilangan identitas, termasuk idealisme dalam menciptakan masyarakat (pasar), karena idealisme bisa dikalahkan oleh kekuatan selera pasar. Sedangkan pendidikan yang berorientasi penciptaan pasar, mampu menjaga identitasnya, idealismenya. Misi penyelenggaraan pendidikan bisa dipertahankan. Namun demikian, tantangan yang dihadapinya adalah rendahnya tingkat serapan dan konsumsi masyarakat terhadapnya akibat adanya jarak antara layanan pendidikan dan selera pasar.

Ditengah dua kategori tersebut, posisi pendidikan Islam sangat dilematis. Disatu sisi ia dihadapkan pada kekuatan pasar yang harus segera direspon, dan disisi lain ia harus mempertahankan misi awal sebagai media penciptaan masyarakat/pasar yang Islami melalui pelestarian nilai-nilai keislaman yang terorganisir dan terlembaga. Jika terlalu bergerak ke sudut kekuatan pasar dengan berbagai selera yang dimiliki, pendidikan Islam bisa kehilangan identitas dan jati dirinya. Jika terlalu bergerak ke sisi idealisme, pendidikan Islam bisa kehilangan pasar potensialnya karena terdapatnya jarak antara dirinya dengan selera pasar.

Pendidikan Islam, harus segera mewaspadai dan merespon dengan bijaksana kekuatan pasar tanpa harus kehilangan jati dirinya. Pendidikan Islam tidak seharusnya kehilangan identitas sebagai sebuah media pelestarian nilai-nilai dan kultur yang telah membentuk keislaman dan kemasyarakatan kaum muslim selama ini.

Untuk tantangan kedua yang berkaitan dengan penguatan muatan materi pendidikan, pendidikan Islam harus mewaspadai kecenderungan merebaknya budaya

⁹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 349-350

instan (dan konsumerisme) dikalangan masyarakat. Pendidikan Islam mestinya meneguhkan prinsip bahwa esensi pendidikan bermuara pada penguatan tiga aspek yang dikenal sebagai trikotomik: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif disimbolkan dengan otak, afektif dengan hati, dan psikomotorik dengan tangan. Simbolisasi otak merujuk kepada substansi peningkatan kecerdasan intelektual, sedangkan hati menjelaskan kecerdasan spiritual. Adapun tangan merupakan simbolisasi atas kecerdasan tindak praktis.

Pendidikan tidak akan bermakna bila tiga kecerdasan di atas tidak dikuatkan. Bagaimana mungkin masyarakat akan mengalami penguatan kecerdasan intelektual bila pembelajaran tidak diselenggarakan dengan baik. Juga bagaimana mungkin masyarakat mengalami pembebasan dari kekeringan dan kegalauan spiritual jika semangat untuk malu bermental buruk sudah tidak lagi ada, dengan selalu membiarkan praktik penjiplakan dan perjokian terus berlangsung. Begitu pula, sulit rasanya mengharapkan kecerdasan tindak praktis sosial-individual bersemayam di perilaku peserta didik bila pendidikan tidak dijalani secara benar. Tuntutan kelulusan melalui ujian nasional tidak boleh menghalalkan segala cara untuk meraih kelulusan itu, termasuk dengan memanfaatkan perjokian dan atau ketidakjujuran akademik.

Tantangan inovasi kurikulum dan khususnya pembelajaran. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia saat ini mengalami berbagai krisis dalam menghadapi permasalahan yang timbul karena perkembangan sosial, politik dan budaya, terutama merebaknya globalisasi. Pendidikan Islam dihadapkan pada persoalan kesigapan dalam merespon tuntutan dan tantangan inovasi, terutama dalam kaitannya dengan kurikulum dan silabi yang digunakan. Praktek pendidikan Islam sejauh ini masih menggunakan metode-metode yang lama yang dalam banyak kasus lemah dalam merespon isu-isu aktual. Kondisi ini mengakibatkan ilmu-ilmu yang lebih moderen memiliki predikat sebagai ilmu yang kurang penting untuk dipelajari di lingkungan pendidikan Islam. Hal tersebut menggambarkan betapa sulitnya lembaga pendidikan Islam di Indonesia dalam menghadapi tantangan transformasi sosial politik dan budaya.

Menurut Muhaimin, permasalahan yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia, khususnya jenjang pendidikan tinggi yang berkaitan dengan desain dan implementasi kurikulum adalah : 1) kurang relevannya materi pembelajaran dengan masyarakat; banyak program studi dan materi pembelajaran yang tidak diminati masyarakat tetap dipertahankan, 2) kurang efektifnya pembelajaran, yakni tidak terjaminnya lulusan yang sesuai dengan harapan, 3) kurang efisiennya penyelenggaraan pembelajaran yakni terlalu banyaknya materi pembelajaran sehingga kompetensi lulusan tidak bisa dijamin secara baik, 4) Kurang fleksibelnya dalam pengembangan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat (setempat, global, maupun nasional), 5) Banyaknya multitafsir atas materi dan praktek pembelajaran, 6) Hanya berupa deretan mata kuliah, 7) Berbasis pada mata kuliah/penyampaian materi bukan pada tujuan kurikuler, 8) Kurang jelas dan kuatnya pengacuan secara fungsional materi pembelajaran terhadap tugas utama kurikuler.¹⁰

Tantangan desentralisasi dan otonomi pendidikan. Desentralisasi adalah pemberian pendelegasian kewenangan, umumnya dari pemilik wewenang (atasan) pada pelaksanan (penguasa dibawahannya) dalam mengambil keputusan. Sedangkan otonomi adalah kemandirian dalam wujud memilih yang disertai adanya kemampuan.¹¹ Desentralisasi dan otonomi pendidikan memiliki karakteristik: (a) Unit perencanaan yang lebih rendah memiliki wewenang untuk menformulasikan targetnya sendiri. (b) Unit yang lebih rendah diberi kewenangan dan kekuasaan untuk memobilisasi sumber-sumber yang ada dan kekuasaan untuk melakukan realokasi sumber-sumber uang telah diberikannya sesuai kebutuhan

¹⁰ Ibid, 182

¹¹ Abdur Rahman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan anak Bangsa Visi, Misi, dan Aksi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 133

prioritasnya. (c) Unit perencanaan yang telah rendah turut berpartisipasi dalam proses perencanaan dengan unit yang lebih tinggi (profinsi atau pusat dimana posisi unit yang lebih rendah sebagai bawahan melainkan sebagai patner dari unit profinsi atau pusat.¹²

Kebijakan pemerintah melalui desentralisasi dan otonomi pendidikan sejatinya memberikan peluang yang sangat besar dan luas kepada pendidikan Islam di Indonesia untuk melakukan akselerasi kualitas penyelenggaraan pendidikannya. Pendidikan Islam mestinya merespon kebijakan tersebut dengan penuh semangat kemajuan. Namun, jika peluang ini tidak dimanfaatkan dengan baik, pendidikan Islam akan gagal untuk bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Karena itu pembenahan yang telah komprehensif perlu dilakukan, mulai dari pengembangan kurikulum, tenaga pendidik, hingga sarana prasarana. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di suatu daerah patut menjadi masukan dan pelajaran bagi pendidikan Islam untuk melakukan yang sama guna mencapai kesuksesan yang serupa pula.¹³

Pendapat lain mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi dalam pendidikan Islam itu muncul atau berakar dari penyebab internal dan penyebab eksternal. Mulai dari permasalahan internal dalam hal manajemen hingga persoalan eksternal seperti politik dan ekonomi menambah sederet daftar problem yang mestinya ditindak lanjuti.

Faktor Internal

Yang dimaksud dengan faktor internal ialah hal-hal yang berasal dari dalam madrasah. Adapun faktor-faktor internal dalam pendidikan Islam, yaitu :

- a. Manajemen pendidikan Islam yang terletak pada ketidakjelasan tujuan yang hendak di capai, ketidakserasian kurikulum terhadap kebutuhan masyarakat, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional, terjadinya salah pengukuran terhadap hasil pendidikan serta masih belum jelasnya landasan yang di pergunakan untuk menetapkan jenjang-jenjang tingkat pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga keperguruan tinggi. Menurut Moh Raqib bahwa problem mutu lulusan lembaga pendidikan Islam selama ini adalah alumni yang bisa dibilang tidak atau kurang kreatif. Indikasi hal tersebut tampak pada alumni yang relatif banyak tidak mendapat lapangan kerja dan lebih mengandalkan untuk menjadi PNS sementara lowongan kerja untuk PNS sangat terbatas. Ini menunjukkan rendahnya kreatifitas untuk menciptakan lowongan kerja sendiri.¹⁴ Tentunya fenomena ketidakkreatifan peserta didik tentu saja tidak lepas dari sistem pendidikan dan pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan yang memang sering kali tidak menekankan peserta didik untuk bersikap kreatif. Padahal manajemen siswa yang meliputi pengolahan siswa menjadi output yang menarik itu penting. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pendidikan dalam lembaga pendidikan Islam pada umumnya belum mampu menyelenggarakan pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang efektif dan berkualitas.
- b. SDM yang kurang
 - 1) Pemimpin sekolah yang lemah dalam komunikasi dan negosiasi. Pimpinan pendidikan Islam bukan hanya sering kurang memiliki kemampuan dalam membangun komunikasi internal dengan para guru, melainkan juga lemah dalam komunikasi dengan masyarakat, orang tua, dan pengguna pendidikan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
 - 2) Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana

¹² Ibid, 135

¹³ Akh. Muzzaki & Kholilah, *Ilmu Pendidikan Islam* (Surabaya: Kopertais IV Press, 2010), 183

¹⁴ Moh. Raqib, *Ilmu Pendidikan Islam : Pengembangan Pendidikan Integrative di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*, (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 2009), 89:

disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

Para guru yang merupakan unsur terpenting dalam kegiatan belajar mengajar, umumnya lemah dalam penguasaan materi bidang studi, terutama menyangkut bidang studi umum, ketrampilan mengajar, manajemen kelas, dan motivasi mengajar.

Para guru seharusnya mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Faktanya tak jarang ditemui guru tidak berkompoten untuk melakukan pengarahan, dan guru yang merasa bahwa tugasnya hanya mengajar.

- c. Campur tangannya organisasi massa (ormas) Islam yang memayungi sekolah-sekolah berbasis keislaman. Keinginan ormas untuk menunjukkan jati diri politis cukup kental dengan memasukkan sejumlah matapelajaran yang berkaitan dengan asal usul pendirian ormas tersebut. Sebut saja misalnya ada materi kemuhammadiyah yang diberikan mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Demikian pula materi ahlussunnah wal jamaah diberikan untuk sekolah yang berbasis ormas Nadhatul Ulama (NU) atau yang di dirikan oleh para tokoh NU. Sekolah atau madrasah yang terkait kedua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia itu seolah ingin menunjukkan jati diri mereka masing-masing sebagai sekolah yang "paling benar" dalam mengemban misi dan visi keislaman. Alhasil, muatan kurikulum sekolah-sekolah berbasis ormas ini seakan 'over dosis' karena kelebihan beban. Sekolah-sekolah umum berbasis Islam ini tidak hanya harus mengikuti kebijakan politis ormas yang melahirkannya dengan mengejawantahkan kebijakan tersebut ke dalam kurikulum sekolah.

Tetapi juga tentunya harus mengikuti ketentuan dan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Pembina utama sekolah-sekolah tersebut. Persoalan politis yang berasal dari internal umat Islam ini memang sudah menjadi ciri khas dari kedua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu. Mereka saling berupaya secara sendiri-sendiri ingin menampilkan keunggulannya masing-masing. Konsekuensinya, penyelenggaraan pendidikan Islam yang ada di Indonesia ini berkembang tanpa sinergitas dan perbedaan yang diramu untuk suatu keunggulan yang lebih besar. Masing-masing ormas tetap ingin mempertahankan jati diri dan kekhasannya sendiri-sendiri.

Maka, untuk kondisi saat ini masih sulit memimpikan kebersamaan antara kedua ormas tersebut dalam bekerjasama untuk melahirkan sekolah-sekolah Islam yang efektif dan di segani tidak hanya di Indonesia tetapi di kancah internasional.

- c. Proses pembelajaran yang konvensional

Dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran, selama ini sekolah-sekolah menyelenggarakan pendidikan dengan segala keterbatasan yang ada. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan sarana-prasarana, ketersediaan dana, serta kemampuan guru untuk mengembangkan model pembelajaran yang efektif. Padahal Menurut Nurhadi dan dkk salah satu aspek penting yang harus dilakukan dalam konteks pembaharuan pendidikan adalah pembaharuan dalam efektivitas metode pembelajaran disamping pembaharuan kurikulum dan kualitas pembelajaran.¹⁵

Dalam PP No 19/2005 tentang standar nasional pendidikan disebutkan dalam pasal 19 sampai dengan 22 tentang standar proses pendidikan, bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Adanya keteladanan pendidik, adanya

¹⁵ .Ahmad Munjin Nasih & Lilik Nur Kholidiah, *Metode dan Teknik Pembelajaran* (Bandung: Cet, 1,2009),115

perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan standar yang ditetapkan di atas, maka proses pembelajaran yang dilakukan antara peserta didik dengan pendidik seharusnya harus meninggalkan cara-cara dan model yang konvensional sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kenyataan saat ini, banyak diantara pendidik yang masih melaksanakan proses pembelajaran secara konvensional bahkan diantaranya belum menguasai teknologi informasi seperti komputer dan internet.

Eksternal

Faktor adalah faktor yang berasal dari luar madrasah, tetapi berpengaruh terhadap perkembangan dan dinamika madrasah. Adapun faktor-faktor eksternal yang dihadapi pendidikan Islam adalah :

- a. Secara politis kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diatur melalui UU sistem pendidikan nasional no 20 tahun 2003 diakui memang memuat keberadaan pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Namun pencantuman Madrasah dalam UU itu sekedar "pelengkap" komponen utama pendidikan nasional. Kenapa demikian? Karena dalam tataran praktis perhatian penyelenggara Negara tampaknya lebih menaruh perhatian dan fokus pada sekolah-sekolah umum (dibawah pengawasan Kemendiknas) baik dari sisi teknis peningkatan mutu persekolahan maupun sisi anggaran yang tersedia. Padahal, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional (UUSPN), madrasah memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya (persekolahan).

Dengan kenyataan ini seringkali tatkala membahas pengembangan persekolahan, sistem pendidikan Islam (madrasah) tidak ikut dikaji secara baik oleh pemangku kebijakan bahkan cenderung diabaikan "neglected community".

- b. Desentralisasi, demokrasi dan otonomi merupakan isu yang mengemuka sekarang ini sebagai dampak dari implementasi UU no.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang itu menyatakan bahwa desentralisasi adalah azas dan proses pembentukan otonomi daerah dan penyerahan wewenang pemerintah di bidang tertentu oleh Pemerintah Pusat. Otonomi ini meliputi juga sektor pendidikan, sehingga menampakkan kesan dualisme dalam pengelolaan pendidikan antara Pusat dan Daerah. Pada bagian lain pendidikan umum bercirikan Islam (madrasah) ditangani Kementerian Agama sedangkan sekolah umum bercirikan Islam diawasi Kementereian Pendidikan Nasional. Padahal berdasarkan teori sistem yang dikemukakan David Easton dalam HAR Tilaar (2009) manajemen pendidikan memerlukan keterpaduan penggerakan sistem sebagai syarat penting keberhasilan sistem.

Secara sociocultural politis pendidikan Islam berlangsung semenjak masuknya Islam di persada Nusantara. Sejak lama masyarakat menumbuh-kembangkan pendidikan Islam baik di masjid maupun pesantren dengan cara bergotong royong. Kemandirian adalah ciri utama pemdidikan Islam kala itu. Hanya saja stigma pendidikan Islam merupakan urusan akherat begitu mengental hingga mempengaruhi tumbuh kembang disiplin ilmu selain agama. Padahal, dunia Barat maju seperti sekarang ini tidak terlepas dari hasil kajian cendekiawan Muslim terdahulu. Di Indonesia, dalam konteks sociocultural politics, skenario

penjajah yang berciri "devide et impera" sukses memisahkan urusan dunia dan ukhrowi, efeknya terasa hingga kini tatkala muncul kesadaran untuk tidak memisahkan keduanya.

- c. Paradigma birokrasi tentang pendidikan Islam selama ini lebih didominasi oleh pendekatan sektoral dan bukan pendekatan fungsional. Pendidikan Islam tidak dianggap bagian dari sektor pendidikan lantaran urusannya tidak di bawah Depdiknas. Dan lebih tragis lagi adalah sikap diskriminatif terhadap produk atau lulusan pendidikan Islam.
- d. Paradigma masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam masih sebelah mata. Lembaga pendidikan Islam merupakan alternatif terakhir setelah tidak dapat diterima di lembaga pendidikan di lingkungan Diknas, itulah yang sering kita temui di sebagian masyarakat kita. Pandangan masyarakat yang demikian menjadi indikator rendahnya kepercayaan mereka terhadap lembaga pendidikan Islam.

Posisi dan peran pendidikan Islam dengan keragaman lembaga yang dimilikinya masih dipertanyakan. Seharusnya: Pendidikan Islam mampu menjalankan perannya sebagai pendidikan alternatif yang menjanjikan masa depan. Tapi faktanya, Kehadiran madrasah, sekolah dan perguruan tinggi Islam cenderung berafiliasi pada ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis atau badan-badan/ yayasan-yayasan Perguruan Islam. Yang Lebih parah lagi, kasus teroris yang dalam kisah pendidikannya ada lulusan sekolah Islam. Ini mungkin menjadi alasan yang tidak cukup kuat, tetapi begitulah sebagian perspektif masyarakat yang ada. Dengan demikian tugas Lembaga Pendidikan Islam yang ada di Indonesia untuk menghasilkan output pendidikan yang tidak sekedar berkualitas iman, tetapi juga ilmu bisa terwujud.

- a. Jumlah dan kualitas buku yang belum memadai
Ketersediaan buku yang berkualitas merupakan salah satu prasarana pendidikan yang sangat penting dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan. Sebagaimana dalam PP No 19/2005 tentang SNP dalam pasal 42 tentang Standar Sarana dan Prasarana disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (ayat 1).
- b. Keterbatasan Anggaran
Ketersediaan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan pendidikan sangat mempengaruhi keberlangsungan penyelenggaraan tersebut. Ketentuan anggaran pendidikan tertuang dalam UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 49 tentang Pengalokasian Dana Pendidikan yang menyatakan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ayat 1).

Realisasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD ternyata masih sangat sulit untuk dilakukan pemerintah.

Solusi atas permasalahan pendidikan Islam di Indonesia

Untuk kepentingan pencarian solusi atas permasalahan yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia, ada dua lapisan teoritik yang penting menjadi perhatian. Lapisan pertama berkaitan dengan bangunan filosofis yang lebih bersifat paradigmatis dari pendidikan Islam di Indonesia. Lapisan kedua berkaitan dengan praktek pembelajaran, baik dari sisi pengembangan kurikulum maupun metode pembelajaran.

Penguatan Bangunan filosofis. Yang berkaitan dengan bangunan filosofis ada beberapa aspek yang perlu dilakukan oleh pendidikan Islam di Indonesia agar permasalahan yang dihadapi tidak saja bisa menemukan solusinya, tetapi juga agar permasalahan tersebut bisa berubah menjadi kelebihan dan kekuatan pendidikan Islam itu sendiri. aspek-aspek yang dimaksud diantaranya adalah:

1. Penguatan konsep ta'lim, ta'dib, dan tarbiyah.

Kata *ta'lim* masdar dari *'allama* yang mengandung arti proses transfer seperangkat pengetahuan kepada anak didik. Dalam proses ta'lim ranah kognitif menjadi titik tekan, dengan begitu. domain kognitif menjadi lebih dominan dibanding ranah afektif dan psikomotorik. Ayat al-Qur'an yang menjadi landasan konsep ini adalah surat Al-Baqarah:31 yang berbunyi: "*wa 'Allama Adama al-Asma'a Kullaha*" yang artinya Dan (Allah) mengajarkan Adam nama-nama tiap-tiap sesuatu. Ayat ini menggambarkan bahwa Nabi Adam bisa menjelaskan nama beberapa hal karena beliau telah diajarkan atau diberikan pengetahuan oleh Allah tentangnya.

Kata *ta'dib* masdar dari *addaba* yang merujuk kepada proses pembentukan kepribadian anak didik. Orientasi ta'dib lebih terfokus pada pembentukan pribadi muslim yang berakhlak mulia. Oleh karena itu cakupan ta'dib lebih banyak kepada ranah afektif dibanding kognitif dan psikomotorik. Yang menjadi dasar konsep ini adalah Hadits Nabi: "*Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi*" yang artinya Allah telah mendidikku dan kemudian menyempurnakan didikan-Nya padaku.

Kata *tarbiyah* masdar dari *rabba* artinya mengasuh, bertanggung jawab, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membesarkan, dan menumbuhkan baik jasmani maupun rohani. Makna tarbiyah lebih luas daripada ta'lim dan ta'dib dengan mencakup semua aspek mulai dari aspek kognitif, afektif hingga psikomotorik secara harmonis dan integral. Dasar dari pemaknaan tarbiyah ini adalah surat al-Isra' : 17 yang berbunyi : "*Wakhfidl lahuma janahadz dzulli minarrahmami wa qurrabbirham huma kama rabbayani shaghira*" artinya Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku sewaktu aku kecil.

Pendidikan Islam Indonesia harus memperkuat ketiga konsep tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan atau pembelajarannya. Muatan dari penguatan ketiga konsep dimaksud adalah penyelenggaraan pendidikan yang menciptakan kesiapan peserta didik untuk senantiasa memahami, mendalami dan sekaligus mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

2. Penguatan hubungan manusia dengan Tuhan, serta manusia dengan sesama dan dengan alam. *Pertama;* hubungan manusia dengan Tuhannya ruang lingkup pengajarannya adalah iman, Islam dan ihsan. *Kedua;* hubungan antar sesama manusia ruang lingkup pengajarannya berkisar antara pengaturan hak dan kewajiban antar manusia, kebudayaan, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu peserta didik benar-benar memahami bahwa dirinya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan manusia lainnya. Pentingnya pemahaman ini adalah agar peserta didik dapat menemukan jati diri swbenarnya dan siap menghadapi tantangan zaman dengan mengenalnya lebih banyak dalam proses belajarnya. *Ketiga;* hubungan manusia dengan alam. Penguatan pada aspek ini adalah agar peserta didik mengenal, mencintai, dan berinteraksi secara positif dengan alam sekitar.

3. Penguatan paradigma profetik.

Langkah ini dinilai sebagai acuan menuju perubahan masyarakat yang meliputi humanisasi dan transendensi. Konsep ini mengedepankan upaya mengatasi dikotomi pendidikan yang dialami pendidikan Islam di Indonesia. Melalui penguatan paradigma profetik ini, ragam ilmu akan dikembalikan kepada nilai hakikinya sebagai perwujudan dari keilmuan Tuhan. Selain itu penyelenggaraan pendidikan akan diorientasikan kepada ketaatan dan pengabdian yang tinggi kepada kepentingan ketuhanan keadilan serta kemanusiaan.

Penguatan praktek pembelajaran. Yang berkaitan dengan bangunan praktek pembelajaran, ada beberapa aspek yang perlu dilakukan oleh pendidikan Islam di Indonesia. Aspek-aspek dimaksud merujuk kepada kebijakan kurikulum, metode pembelajaran, hingga sarana prasarana. Pembinaan pada aspek-aspek ini dimaksudkan agar permasalahan praktek penyelenggaraan pendidikan yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya menemukan solusinya, tetapi juga permasalahan tersebut bisa berubah menjadi kelebihan dan kekuatan pendidikan Islam itu sendiri.

a. Pengembangan kebijakan kurikulum yang dinamis-progresif

Pengembangan kurikulum merupakan upaya perubahan kualitatif dalam menghadapi berbagai perkembangan dalam masyarakat. Oleh karena itu pengembangan kurikulum bukan proses yang statis melainkan proses yang dinamis. Makna dinamis ini menunjuk kepada prinsip kemajuan (*progress*).

Dalam menghadapi tantangan masa depan, kurikulum lembaga pendidikan Islam di Indonesia harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Merancang pendidikan perlu didasarkan pada konteks dan proses dalam kerangka pengembangan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Dengan begitu, terhadap perubahan atau perkembangan yang terjadi pada kurikulum nasional, baik kurikulum 1994, KBK (kurikulum berbasis kompetensi), hingga KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan), pendidikan Islam bisa cenderung responsif, dinamis, dan berorientasi kemajuan.

b. Pengembangan metode pembelajaran yang relevan.

Ada beberapa macam metode pembelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi pembelajaran pendidikan Islam. Metode- metode itu adalah: 1) metode demonstrasi, metode yang menggunakan peragaan untuk memperjelas pengertian secara efektif. 2) metode eksperimen, metode yang melibatkan fisik, mental serta emosional siswa. 3) metode resitasi, yaitu pemberian tugas yang menekankan pada anak didik untuk menyelesaikan sejumlah kecakapan dan keterampilan tertentu. 4) metode problem solving, metode yang dilakukan melalui sebuah proses dinamis untuk memecahkan sebuah permasalahan. 5) metode *mind mapping*, metode dengan menggunakan catatan-catatan kreatif dan dibentuk menjadi sebuah pola gagasan yang saling berkaitan dengan topik utama, sementara subtopik dan perincian menjadi cabang-cabangnya. 6) metode *quantum teaching*, metode yang menggunakan macam-macam interaksi yang ada dalam momen belajar.¹⁶

Upaya lain yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan Islam adalah dengan cara sistem pendidikan Islam harus direformasi, direaktualisasi, dan diinovasi agar dapat menyelesaikan diri dengan dinamika masyarakat dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat era pasar bebas.

1. Dalam menghadapi pasar bebas, upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Lembaga pendidikan Islam harus meningkatkan daya saing dengan sungguh-sungguh dan terencana, sehingga layak bersaing dalam pergaulan internasional dan global. Disamping ilmu dan keterampilan tamatan lembaga pendidikan Islam harus

¹⁶ Akh. Muzzaki & Kholilah, *Ilmu Pendidikan Islam*, 189

- mampu berkomunikasi dalam bahasa asing terutama bahasa Arab dan Inggris. Untuk terlaksananya hal tersebut perlu ditunjang oleh kepemimpinan yang tangguh, mandiri, namun mampu menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain.
- b. Lembaga pendidikan Islam membuka program studi yang bervariasi seperti; program studi ilmu alam, ilmu sosial, ilmu bahasa, MAK dan MAKj. Diantara prodi yang dapat dikembangkan di MAKj adalah perikanan, pertanian, kerajinan, peternakan, pekerjaan sosial, busana, kecantikan, boga, perhotelan, agronomi, bangunan, elektronika, otomotif, perabot rumah tangga, grafika, pelayaran, pariwisata, administrasi perkantoran, perdagangan, koperasi, seni rupa, seni pertunjukan.
 - c. Lembaga pendidikan Islam harus memperkuat fungsi-fungsi kritis dan berorientasi ke masa depan (*future oriented*) melalui analisis yang berkeanjutan tentang kecenderungan-kecenderungan perubahan dan perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang sedang tumbuh dan sekaligus memberikan fokus bagi prediksi, peringatan dan pencegahan. Namun pada posisi lain lembaga pendidikan Islam tetap mempertahankan identitasnya dan tidak boleh meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Dengan demikian tamatan lembaga pendidikan Islam memiliki visi yang mendunia sekaligus mempunyai kapasitas membangun yang mempribumi.
 - d. Lembaga pendidikan Islam harus melaksanakan akuntabilitas tidak hanya dalam hal pemanfaatan sumber-sumber keuangan secara lebih bertanggungjawab tetapi juga dalam pengembangan keilmuan, kandungan pendidikan dan program-program yang diselenggarakan. Akuntabilitas tersebut dalam bentuk laporan prestasi yang telah dicapai oleh lembaga pendidikan yang harus dilaporkan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.
 - e. Lembaga pendidikan Islam harus melakukan evaluasi secara terus menerus dan berkelanjutan agar jaminan kualitas dapat dipertanggungjawabkan. Indikator yang digunakan berupa kinerja personil, proses pembelajaran, kualitas out-put dan out-come. Dengan evaluasi lembaga dapat mengkaji ulang kemajuan pendidikan dan menemukan metode baru untuk perbaikan dan pengembangan.
2. Dalam menghadapi otonomi daerah, upaya yang dilakukan adalah:
 - a. Lembaga pendidikan Islam tidak lagi tampil dalam bentuk yang uniform dan tunggal untuk seluruh wilayah di Indonesia. Ia perlu diberi kesempatan berkembang senafas dengan aspirasi lingkungannya. Kualitas hasil pendidikan akan dinilai oleh masyarakat. Demikian pula hidup dan matinya lembaga akan ditentukan oleh masyarakat.
 - b. Perlu adanya kerja sama antara Departemen Agama dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan Islam.
 - c. Orientasi pengorganisasian dan pengelolaan madrasah diarahkan kepada terciptanya hubungan timbal balik antara madrasah dan masyarakat dalam rangka memperkuat posisi madrasah sebagai lembaga pendidikan.
 - d. Organisasi pendidikan di daerah harus lebih baik dari sebelumnya, ramping, lincah, efektif dan efisien.
 3. Masalah normatif-filosofis, lembaga pendidikan Islam harus melakukan reorientasi. Reorientasi dilakukan oleh pelaksana pendidikan dengan mengkaji ulang tentang masalah normatif filosofis yang sering diperdebatkan. Dalam hal ini melibatkan para pakar sesuai dengan bidang keahliannya.
 4. Masalah yang berkaitan dengan praktek pendidikan perlu dilakukan perubahan paradigma sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan tenaga kependidikan harus efektif dan profesional. Tenaga kependidikan tersebut adalah guru, pegawai tata usaha, guru bimbingan, petugas perpustakaan dan sebagainya.

- b. Pembiayaan pendidikan tidak cukup diperoleh dari pemerintah saja tetapi yang lebih utama sebenarnya adalah dari lembaga dan dari masyarakat. Lembaga pendidikan Islam harus berusaha mencari sumber dana yang halal diantaranya; 1) membentuk badan usaha atau koperasi, 2) bekerjasama dengan negara-negara Islam yang kaya sumber daya alamnya, 3) mengusahakan sumber dana dari wakaf produktif, 4) menyediakan dana abadi, 5) membentuk lembaga LAZIS, 6) mencari sumbangan dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- c. Melakukan reformasi dalam sistem pembelajaran; dari metode guru yang otoriter dan instruktif menjadi guru yang bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing pengalaman belajar, dari sistem pembelajaran yang verbalis menjadi sistem belajar yang menemukan *insight*, dari sistem evaluasi yang berorientasi *subject matter* menjadi sistem evaluasi yang didasarkan kompetensi, pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dari belajar dengan mendengarkan menjadi belajar dengan melakukan, dari komunikasi yang tertutup menjadi komunikasi terbuka, dari *one way communication* menjadi *multi way communication*, dari kurikulum yang *subject matter* menjadi kurikulum yang berbasis kompetensi.
- d. Demokratisasi dalam proses pembelajaran. Memberikan kepada semua peserta didik kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya.
- e. Melaksanakan efisiensi pendidikan melalui; 1) manajemen pendidikan yang dapat memberdayakan peran serta masyarakat, institusi dan tenaga kependidikan secara demokratis dan efisien, 2) pengelolaan anggaran berorientasi kepada efisiensi dan ketergunaan, 3) pemanfaatan gedung, alat perlengkapan sekolah dan media pendidikan lainnya secara maksimal, 4) tidak ada potensi dan SDM tenaga kependidikan yang tidak dimanfaatkan, 5) konflik internal yang bersifat non akademis dihindari, 6) fasilitas lembaga yang sederhana namun nyaman dan fungsional. Menggunakan produk lokal dan kalau perlu dibikin sendiri oleh lembaga, 7) perencanaan dan pengelolaan akademik, administrasi dan keuangan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Adanya relevansi antara hasil pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja yang diwujudkan melalui kurikulum yang sarat dengan materi yang fungsional terhadap tuntutan masa depan peserta didik berupa keterampilan memasuki dunia kerja.
- g. Agar lulusan lembaga pendidikan Islam memiliki keunggulan kompetitif dan kooperatif sesuai standar mutu nasional dan internasional, kurikulum perlu dikembangkan dengan pendekatan kompetensi.
- h. Setiap siswa harus memiliki keterampilan belajar mandiri untuk membuatnya mentransformasikan materi ajar menjadi pengalaman belajar melalui kegiatan belajar.
- i. Evaluasi belajar secara teratur dan berkelanjutan, bukan hanya ditujukan untuk mengetahui daya serap dan kemampuan para peserta didik saja, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan hasil belajar tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan program.
- j. Pembudayaan kualitas bagi setiap warga lembaga pendidikan Islam dapat dilakukan dengan meningkatkan profesionalitas personil madrasah. Budaya kualitas dalam suatu madrasah dapat dilihat dari komponen-komponen sebagai berikut: 1) informasi tentang kualitas proses dan hasil pendidikan harus digunakan untuk perbaikan mutu pesantren, 2) kewenangan pimpinan harus dilandasi tanggung jawab moral dan profesional, 3) hasil pendidikan harus diikuti oleh penghargaan (*reward*) atau sanksi (*punishment*), 4) kolaborasi dan sinergi harus merupakan basis untuk kerjasama bukan kompetensi, 5) warga merasa aman dalam pekerjaannya, 6) atmosfer keadilan harus

ditanamkan, 7) imbalan jasa harus sepadan dengan nilai pekerjaannya, dan 8) warga merasa memiliki.¹⁷

Kesimpulan

Penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia meskipun dari tahun ke tahun sudah diupayakan untuk mencapai yang terbaik akan tetapi dalam perkembangannya masih mengalami berbagai macam kendala, hambatan dan persoalan baik yang bersumber dari interen maupun dari eksteren pendidikan Islam. Dan di atas telah dijelaskan dengan panjang lebar tentang permasalahan yang telah dihadapi oleh pendidikan Islam di Indonesia yang dapat digaribawahi bahwa permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan Islam sekarang adalah terletak pada mutu dan kualitas pendidikan Islam yang kurang sinkron dengan kebutuhan masyarakat dan kurang tanggap dengan tuntutan dunia kerja.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan cara sistem pendidikan Islam harus direformasi, direaktualisasi, dan diinovasi agar dapat menyelesaikan diri dengan dinamika mesyarakat dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat era pasar bebas dan otonomi daerah

Daftar Rujukan

- Abdur Rahman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan anak Bangsa Visi, Misi, dan Aksi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Akh. Muzzaki & Kholilah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Surabaya, Kopertais IV Press, 2010
- Ahmad Munjin Nasih & Lilik Nur Kholidiah, *Metode dan Teknik Pembelajaran*, Bandung: Cet, 1,2009
- Moh. Raqib, *Ilmu Pendidikan Islam : Pengembangan Pendidikan Integrative di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*, Yogyakarta, LKiS Yogyakarta, 2009
- Pius. A. Partanto & M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arloka, 1994
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 2002
- Usman Abu bakar & Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam (Respon Kreatif Terhadap Undang-undang Sisdiknas)*, Yogyakarta, Safiria Insania Press, 2005
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993

¹⁷ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, 350-356